

**PERANAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* DALAM
MENGIMPLEMENTASIKAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*
(Studi Kasus Pada PT. Jamsostek (Persero) Kantor Cabang Cimahi)**

Anggraeni
Silviana Agustami

Universitas Pendidikan Indonesia

Abstrak

Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui bagaimana peranan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam mengimplementasikan *Good Corporate Governance* (GCG) dilihat dari sisi prinsip *responsibility*, yaitu dalam pelaksanaan program-program CSR dan laporan keuangan CSR PT. Jamsostek (Persero) Kantor Cabang Cimahi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang didapat dari data perusahaan, hasil wawancara secara mendalam (*in-depth interview*) dan dokumentasi berupa rekaman hasil wawancara antara peneliti dengan responden yang diwawancarai. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah para *account officer* yang menangani CSR, Kepala Bidang (Kabid) Keuangan PT. Jamsostek (Persero) Kantor Cabang Cimahi dan Kepala Cabang (Kacab) PT. Jamsostek (Persero) Kantor Cabang Cimahi, selain itu juga para penerima bantuan CSR yaitu pengusaha kecil dan peserta Jamsostek. Teknik pengujian kredibilitas data yang digunakan adalah triangulasi dengan sumber data dan teori. Hasil dari penelitian ini adalah dapat dinyatakan bahwa PT. Jamsostek (Persero) Kantor Cabang Cimahi belum optimal dalam melaksanakan program-program CSR yang ada. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu diantaranya kurangnya sosialisasi program CSR kepada masyarakat dan perusahaan, sulitnya prosedur peminjaman dan sebagainya. Disini dapat dikatakan jika dari CSR PT. Jamsostek (Persero) Kantor Cabang Cimahi belum optimal, maka GCG perusahaan tersebut juga belum dikatakan berjalan baik jika dilihat dari sisi prinsip *responsibility* nya.

Kata Kunci : *Corporate Social Responsibility* (CSR), *Good Corporate Governance* (GCG).

Pendahuluan

Pentingnya penerapan sistem tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) masih menjadi fokus utama dalam pengembangan usaha di Indonesia terutama dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi. Upaya untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya GCG dan penerapannya di Indonesia telah dilakukan, baik oleh pemerintah maupun swasta. Konsep GCG adalah konsep yang memang sudah saatnya diimplementasikan dalam perusahaan perusahaan yang ada di Indonesia.

Penerapan CSR secara konsisten merupakan bagian dari upaya memaksimalkan nilai perusahaan. Pernyataan ini juga diperkuat oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ermadiani&Bambang Suharto (2010) dengan judul yang hampir sama mengenai hubungan antara CSR dan GCG dengan objek penelitian di PT. Pertamina (Persero) UP III yang menyatakan bahwa PT. Pertamina (Persero) UP III telah melaksanakan CSR, meskipun GCG belum diterapkan pada perusahaan tersebut secara keseluruhan. Namun demikian, konsep CSR yang telah tertanam dalam *strategic planning* PT. Pertamina (Persero) UP III mendapat penguatan tatkala perusahaan megimplementasikan GCG. Dari hasil penelitian tersebut dapat diartikan bahwa CSR merupakan bagian dari prinsip *responsibility* memiliki peranan dalam mengimplementasikan GCG suatu perusahaan.

Sedangkan PT. Jamsostek (Persero) sendiri mempunyai lima tujuan membangun budaya GCG, yaitu; (1) Alat untuk mencapai visi, misi dan nilai perusahaan; (2) Meningkatkan nilai perusahaan melalui peningkatan kinerja finansial dan operasional; (3) Pedoman bagi seluruh insan Jamsostek; (4) Keseimbangan atau *check and balances*; (5) Meningkatkan peran dan kepedulian terhadap lingkungan (*Corporate Social Responsibility*).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, Berikut ini adalah gambaran dari persamaan dan perbedaan antara penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang:

Tabel. 1.1
Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Judul	Penulis, Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Tinjauan Yuridis Terhadap <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) dalam <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) Judul	Jamin Ginting, 2007 Penulis, Tahun	Sama-sama membahas mengenai hubungan/ keterkaitan antara CSR dan GCG. Persamaan	Penelitian sekarang membahas peranan CSR dalam mengimplementasikan GCG di suatu perusahaan. dilihat dari sisi akuntansi bukan dari sisi yuridis/hukum. Perbedaan
2.	<i>Good Corporate Governance</i> sebagai Pilar Implementasi <i>Corporate Social Responsibility</i> (Studi kasus pada Bank X).	Diah Febriyanti (2010)	-Sama-sama membahas mengenai hubungan CSR dan GCG. -Objek penelitian sama-sama pada perusahaan BUMN -Metode penelitian yang digunakan kualitatif.	-Judul ini membahas mengenai GCG sebagai implementasi CSR, sedangkan judul skripsi ini membahas sebaliknya, yaitu peranan CSR dalam mengimplementasikan GCG. -Objek penelitian ini adalah bank dan objek penelitian penulis adalah perusahaan asuransi sosial tenaga kerja.
3.	Pengaruh Karakteristik <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) Terhadap Luas Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) di Indonesia	Waryanto, (2010)	Sama-sama membahas mengenai hubungan CSR dan GCG.	-Judul ini hanya mengungkapkan mengenai laporan tahunan CSR perusahaan-perusahaan di Indonesia sedangkan skripsi penulis membahas program CSR dan laporan keuangan yang dilaksanakan satu

				perusahaan saja. -Metode penelitian yang dipakai adalah kuantitatif, sedangkan penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode kualitatif.
4.	Pengaruh Elemen <i>Good Corporate Governance (GCG)</i> Terhadap Pelaporan <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> pada Sektor Perbankan di Indonesia	Andriyati M. Sinaga,(2011)	Sama-sama membahas mengenai hubungan pelaporan CSR.	-Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. -Penelitian ini menggunakan objek penelitian di sektor perbankan Indonesia.

Tinjauan Pustaka

Definisi *Corporate Social Responsibility (CSR)*

Walaupun telah menjadi sebuah isu global, sampai saat ini belum ada suatu definisi tunggal dari *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang diterima secara global. Secara etimologis *Corporate Social Responsibility (CSR)*, dapat diartikan sebagai tanggung jawab sosial perusahaan. Berikut adalah beberapa definisi dari CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan :

Hendrik Budi Untung (2008:1) mendefinisikan CSR sebagai,

Komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Definisi CSR versi Indonesia dapat ditemui dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas pasal 1 butir 3, yang berbunyi : Yang dimaksud dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Sedangkan menurut Jenny Ratna Suminar (2009:29), CSR adalah:

Operasi bisnis yang berkomitmen tidak hanya untuk meningkatkan keuntungan perusahaan secara finansial, melainkan pula untuk pembangunan sosial-ekonomi kawasan secara holistik, melembaga dan berkelanjutan.

Selain itu, adapun pengertian CSR menurut Edi Suharto (2009:105) adalah sebagai berikut :Kepedulian perusahaan yang menyisihkan sebagian keuntungannya (*profit*) bagi kepentingan pembangunan manusia (*people*) dan lingkungan (*plannet*) secara berkelanjutan berdasarkan prosedur (*procedure*) yang tepat dan profesional.

Dari pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa *Corporate Social Responsibility (CSR)* adalah komitmen perusahaan/bisnis yang tidak hanya untuk meningkatkan keuntungan semata, melainkan untuk pembangunan sosial dan ekonomi secara berkesinambungan atau berkelanjutan.

Definisi *Good Corporate Governance* (GCG)

Untuk menciptakan pasar yang efisien, transparan dan konsisten dengan peraturan perundang-perundangan, maka diperlukan pelaksanaan *good corporate governance*. Menurut FCGI (dalam Yudha Pranata,2007:8) pengertian *Good Corporate Governance* adalah :

Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan esktern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.

Sementara itu, *World Bank* (dalam, Mardiasmo, 2002:18) mendefinisikan bahwa : '*Good Corporate Governance* yaitu suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha'.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* merupakan suatu sistem tata kelola perusahaan yang berisi peraturan-peraturan serta etika yang wajib dipenuhi untuk meningkatkan kinerja perusahaan sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan terhadap pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan esktern lainnya

Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Yusuf Wibisino (2007:7) menyatakan definisi CSR secara etimologis di Indonesia kerap diterjemahkan sebagai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Namun setelah tanggal 16 Agustus 2007, CSR di Indonesia telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat UUPT bahwa CSR yang dikenal dalam undang-undang ini sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 Ayat 3 yang berbunyi

'Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya'

Dari berbagai definisi CSR yang beragam diungkapkan oleh para ilmuan tersebut di atas, maka peneliti menyatakan konsep yang perlu dipahami tentang CSR ini, yakni CSR menawarkan sebuah kesamaan dalam bentuk keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis dan perhatian terhadap aspek sosial serta lingkungan. Selain itu, ada beberapa isu yang terkait dengan CSR antara lain *Good Corporate Governance* (GCG), *Sustainable Development*, Protokol Kyoto, *Millenium Development Goals* (MDGs) dan *Triple Bottom Line*. *Good Corporate Governance* (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik diperlukan agar perilaku bisnis mempunyai arahan yang baik. Intinya, GCG merupakan sebuah

sistem dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham dan dewan komisaris serta dewan direksi demi tercapainya tujuan korporasi. Dalam arti luas mengatur hubungan seluruh kepentingan *stakeholders* dapat dipenuhi secara proporsional. Adapun hubungan antara GCG dengan CSR terdapat pada prinsip *responsibility* yang merupakan prinsip yang paling dekat dengan CSR. Dalam prinsip ini, penekanan yang signifikan diberikan kepada *stakeholders* perusahaan. Penerapan prinsip ini diharapkan perusahaan dapat menyadari bahwa dalam kegiatan operasionalnya seringkali menghasilkan dampak eksternal yang harus ditanggung oleh *stakeholders*. Oleh sebab itu, wajar bila perusahaan juga memperhatikan kepentingan dan nilai tambah bagi *stakeholders* di sekitarnya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan CSR merupakan salah satu bentuk implementasi dari konsep GCG. Sebagai entitas bisnis yang bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungannya, perusahaan memang mesti bertindak sebagai *good citizen* yang merupakan tuntutan dari *good business ethics*. CSR juga dapat ditelusuri melalui konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Konsep ini secara sederhana didefinisikan sebagai pembangunan atau perkembangan yang memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa membahayakan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya.

Di Indonesia, CSR lebih dikenal dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sebagaimana yang sudah termuat dalam UUPT. Dengan keberadaan UUPT tersebut membuat kegiatan atau program TJSL menjadi wajib. Ketentuan itu terdapat dalam Pasal 74 Ayat (1). Konsep CSR juga telah banyak berkembang di negara lain dan Indonesia mengadopsi CSR yang awalnya berkembang di negara kapitalis karena menilai hal ini perlu diatur mengingat semakin besarnya jumlah perusahaan di Indonesia yang menjalankan CSR setengah hati disertai kerusakan lingkungan yang semakin parah. Jika melihat sasaran CSR yang memperhatikan aspek lingkungan dan sosial maka kedua aspek tersebut yang memiliki kecenderungan sebagai latar belakang pengaturan CSR di Indonesia yang lebih dikenal dengan TJSL.

Pada saat ini CSR dapat dianggap sebagai investasi masa depan bagi perusahaan. Minat para pemilik modal dalam menanamkan modal di perusahaan yang telah menerapkan CSR lebih besar, dibandingkan dengan yang tidak menerapkan CSR. Melalui program CSR dapat dibangun komunikasi yang efektif dan hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan masyarakat sekitarnya. Dalam aktualisasi *Good Corporate Governance*, kontribusi suatu perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat mengalami metamorfosis, dari yang bersifat *charity* menjadi aktivitas yang lebih menekankan pada penciptaan kemandirian masyarakat, yakni program pemberdayaan (Ambaddar, 2008). Metamorfosis kontribusi perusahaan tersebut diungkapkan oleh Za'im Zaidi (2003) dalam Ambaddar (2008), yaitu dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.2

Metamorfosis CSR

Paradigma	<i>Charity</i>	<i>Philantropy</i>	<i>Good Corporate Governance (GCG)</i>
Motivasi	Agama, tradisi, adaptasi	Norma, etika dan hukum universal	Pencerahan diri dan rekonsiliasi dengan
Paradigma	<i>Charity</i>	<i>Philantropy</i>	<i>Good Corporate Governance (GCG)</i>
			keterlibatan sosial
Misi	Mengatasi masalah setempat	Mencari dan mengatasi akar masalah	Memberikan kontribusi terhadap masyarakat
Pengelolaan	Jangka pendek, mengatasi masalah sesaat	Terencana, terorganisasi dan terprogram	Terinternalisasi dalam kebijakan perusahaan
Pengorganisasian	Kepanitiaan	Yayasan/dana abadi/profesionalitas	Keterlibatan baik dana maupun sumberdaya lain
Penerima manfaat	Orang miskin	Masyarakat luas	Masyarakat luas dan Perusahaan
Kontribusi	Hibah sosial	Hibah pembangunan	Hibah (sosial dan pembangunan serta keterlibatan sosial
Inspirasi	Kewajiban	Kepentingan bersama	

Di PT Jamsostek (Persero), penerapan GCG dimulai sejak tahun 2004. Prinsip GCG yang mengutamakan keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, adil, dan independen diterapkan untuk menunjang pencapaian visi dan misi perusahaan serta mendukung upaya pengembangan ke depan. Tujuan dari penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* PT. Jamsostek (Persero) digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1.1
Tujuan Good Corporate Governance (GCG) PT. Jamsostek (Persero)

PT. Jamsostek (Persero) memiliki tujuan membangun budaya GCG sebagai sebuah sistem, yaitu; (1) Alat untuk mencapai visi, misi dan nilai perusahaan; (2) Meningkatkan nilai perusahaan melalui peningkatan kinerja finansial dan operasional; (3) Pedoman bagi seluruh insan Jamsostek; (4) Keseimbangan atau *check and balances*; (5) Meningkatkan peran dan kepedulian terhadap lingkungan (*Corporate Social Responsibility*). (www.jamsostek.co.id)

Dari penjelasan diatas jelas, bahwa salah satu tujuan dari penerapan GCG adalah untuk melaksanakan CSR. Jadi ketika CSR telah dilaksanakan oleh PT. Jamsostek (Persero) maka salah satu tujuan dalam membangun budaya GCG telah tercapai.

Kerangka Pemikiran

Good Corporate Governance di negara kita sangat terlambat jika dibandingkan dengan dengan negara-negara lain, mengingat masuknya konsep GCG di Indonesia pada awalnya diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia dan *International Monetary Fund* (IMF) dalam rangka pemulihan ekonomi (*economy recovery*) pasca krisis. Menurut Monks yang dikutip oleh Thomas S. Kaihatu pengertian *Good Corporate Governance* adalah sebagai berikut:

“*Good Corporate Governance* merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholders*. ” (2006:2)

Dari pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa *corporate governance* merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk mencapai nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholders*.

Dalam menjamin kelangsungan dan eksistensi perusahaan, setiap perusahaan harus memastikan bahwa setiap prinsip dasar GCG senantiasa diterapkan pada aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Menurut Moh. Wahyudin Zarkasyi, terdapat lima prinsip dasar *Good Corporate Governance* dalam penerapannya, yaitu; (1) Transparansi (*Transparency*); (2) Akuntabilitas (*Accountability*); (3) Kesetaraan dan Kewajaran (*Fairness*); (4) Independensi (*Independency*); (5) Responsibilitas (*Responsibility*). (2008:38)

Dari penjelasan mengenai prinsip dasar GCG di atas, maka dapat disimpulkan bahwa setiap perusahaan harus memastikan bahwa setiap prinsip dasar GCG yakni transparansi, akuntabilitas, kesetaraan dan kewajaran, independensi, dan responsibilitas harus senantiasa diterapkan pada aspek bisnis dan di semua lini perusahaan.

Dari kelima prinsip tersebut, salah satunya, yaitu terdapat prinsip *responsibility* yang dapat diimplementasikan lewat aktivitas CSR dan laporan pertanggungjawaban CSR dalam bentuk laporan keuangan. Pelaksanaan CSR perlu dilandasi oleh kesadaran perusahaan terhadap fakta tentang adanya jurang yang makin jelas antara kemakmuran dan kemiskinan, baik dari tataran global maupun nasional. Oleh karena itu, diwajibkan atau tidak CSR harus merupakan komitmen dan kepedulian dari para pelaku bisnis untuk ambil bagian dalam mengurangi kemiskinan.

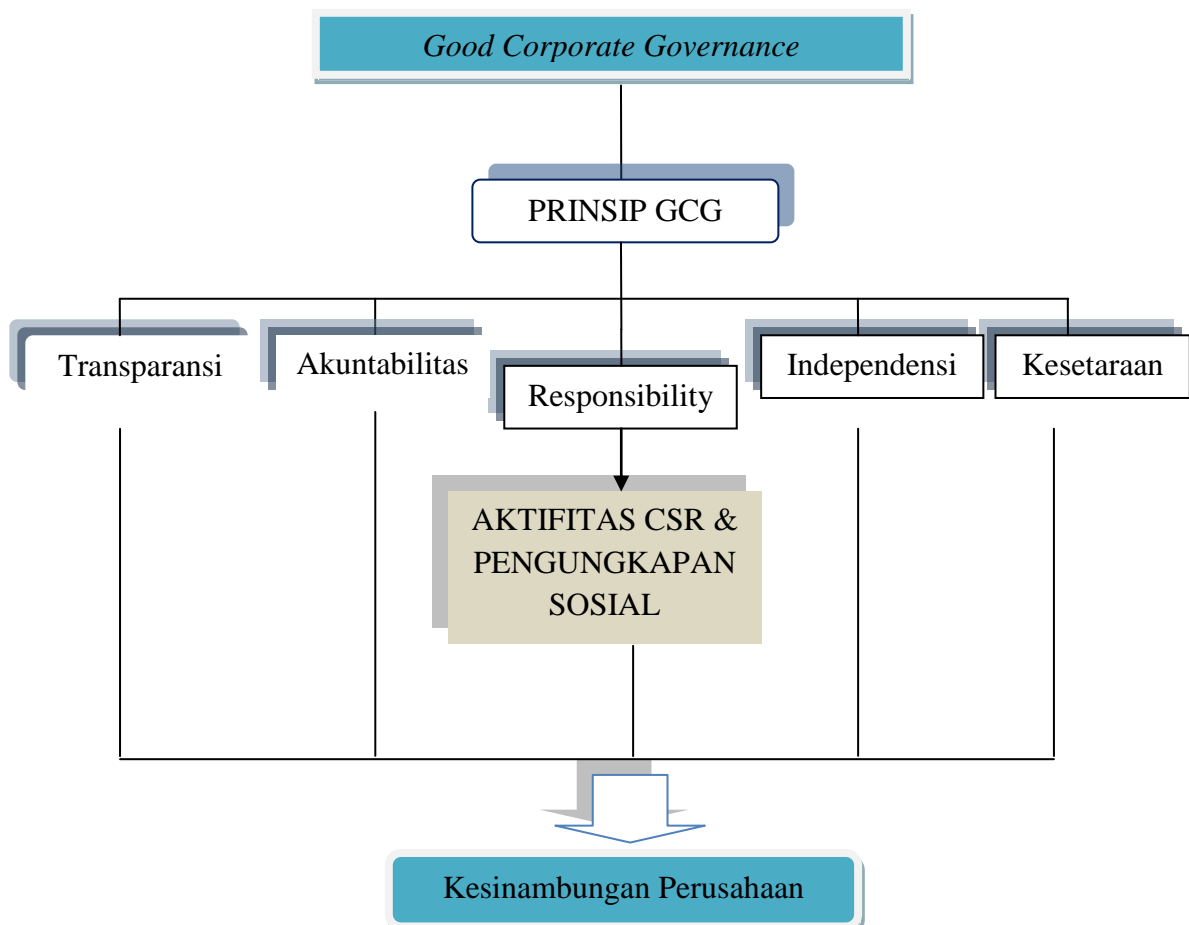
Pengertian CSR menurut Edi Suharto adalah sebagai berikut:

Kepedulian perusahaan yang menyisihkan sebagian keuntungannya (*profit*) bagi kepentingan pembangunan manusia (*people*) dan lingkungan (*plannet*) secara berkelanjutan berdasarkan prosedur (*procedure*) yang tepat dan profesional. (2009:105)

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa CSR adalah kepedulian perusahaan dalam menyisihkan sebagian keuntungannya untuk pembangunan sosial dan lingkungan secara berkelanjutan berdasarkan prosedur yang tepat dan profesional.

Sedangkan menurut Gunawan & Yeremia. A.P pentingnya keterkaitan CSR dengan GCG adalah sebagai berikut CSR terkait dengan hal-hal yang berhubungan penyelenggaraan perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) yang dikaitkan dengan masalah keterbukaan (*disclosure*), transparansi dan akuntabilitas, masalah hak asasi manusia, khususnya dalam bidang ketenagakerjaan, perlindungan terhadap hak-hak konsumen, isu mengenai lingkungan hidup yang harus dijaga dan dipelihara kelestariannya, serta keterlibatan masyarakat secara langsung bagi jalannya usaha perusahaan. (2008:41)

Dari penjelasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa jika CSR yang merupakan bagian dari prinsip *responsibility* dilaksanakan, maka GCG juga dapat dilaksanakan secara utuh jika keempat prinsip lainnya pun dilaksanakan dengan baik dan akan dapat memberi jaminan kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan dapat berperan pada kesinambungan perusahaan .



Gambar 1.2 Kerangka Pemikiran

Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi.

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan fenomenologi, maka dalam penelitian kualitatif ini yang diekspos adalah fenomena yang diteliti itu dari berbagai aspek yang berhubungan dengannya (Burhan Bungin, 2010:74)

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Penentuan sumber data dalam penelitian kualitatif menggunakan *nonprobability sampling* dengan metode *purposive sampling*.

Dalam penelitian ini metode *purposive sampling* diberlakukan pada narasumber yang berperan staf account officer, dan bagian keuangan di PT. Jamsostek (Persero) Kantor Cabang Cimahi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan pelaporan CSR terkait dengan pertimbangan bahwa tidak semua pihak, divisi, ataupun staf PT. Jamsostek (Persero) Kantor Cabang Cimahi berhubungan langsung dengan pelaksanaan kegiatan dan pelaporan CSR.

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara, yaitu antara lain Informan kunci; (1) Informan kunci dalam penelitian ini adalah *account officer* yang menangani program CSR, Kabid Keuangan dan Kacab PT. Jamsostek (Persero) Kantor Cabang Cimahi, Dari informan tersebut akan dicari informasi mengenai bagaimana pelaksanaan CSR dan laporan pertanggungjawaban CSR pada PT. Jamsostek Kantor Cabang Cimahi; (2) Informan pendukung Informan pendukung dalam penelitian ini adalah pihak-pihak lain yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan pelaksanaan CSR ini. Dalam hal ini adalah penerima bantuan CSR dari PT. Jamsostek Kantor Cabang Cimahi, baik peserta ataupun masyarakat seperti para pengusaha kecil dan sebagainya. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang terdiri dari; (1) Survey Kepustakaan; (2) Observasi langsung; (3) Wawancara mendalam (*in depth interview*); (4) Dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini mempunyai beberapa proses, seperti diuraikan sebagai berikut; (1) Reduksi; (2) *Data Display*; (3) *Concluding Drawing (Verification)* Kesimpulan dalam penelitian ini akan diungkapkan berupa gambaran atau teks secara deskripsi berdasarkan hasil penelitian di lapangan. Teknik Pengujian Kredibilitas Data Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber data dan triangulasi teori.

Hasil dan Pembahasan

PT. Jamsostek (Persero) merupakan salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam pelaksanaan program asuransi sosial tenaga kerja yang telah menerapkan *corporate social responsibility (CSR)*. Dan CSR PT. Jamsostek (Persero) salah satunya didasari oleh peraturan dari pemerintah dan BUMN. PT. Jamsostek (Persero) memiliki dua bentuk CSR, yaitu

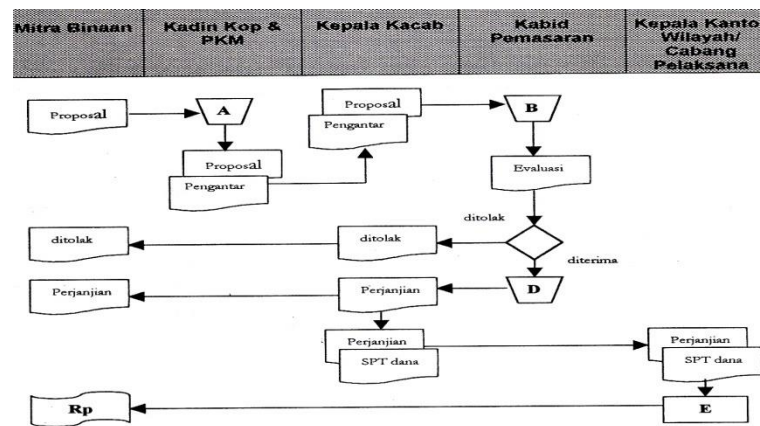
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta (DPKP).

Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara, sebagai lembaga pemerintah yang menaungi dan mengayomi institusi BUMN, turut menindaklanjuti Pasal 88 UU RI No. 19 Tahun 2003 tersebut dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (PKBL) yang telah mulai diberlakukan untuk tahun buku 2007 dan ditetapkan pada tanggal 27 April 2007.

Namun, untuk mengetahui apakah “*responsibility*” yang diusung melalui program CSR dari perusahaan-perusahaan BUMN khususnya PT. Jamsostek (Persero) benar telah sesuai peraturan, tepat sasaran juga sesuai dengan prinsip *responsibility* yang sebenarnya, maka dibawah ini akan dikemukakan lebih jelasnya mengenai penerapan program-program CSR yang dilaksanakan oleh PT. Jamsostek (Persero) Kantor Cabang Cimahi. Berikut adalah hasil penelitian yang telah dilakukan penulis terhadap dua bentuk CSR PT. Jamsostek (Persero) kantor Cabang Cimahi, yaitu PKBL dan DPKP :

a. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

Program Kemitraan adalah salah satu program dari Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang lebih dikenal sebagai PKBL. Program kemitraan ini merupakan kerjasama antara BUMN dengan Usaha Kecil yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN, sesuai dengan Keputusan Menteri BUMN No.Kep-236/MBU/2003. Berikut adalah flowchart penyaluran pinjaman dana untuk mitra binaan :



- A : Kadin Kop dan PKM memberikan surat pengantar/rekomendasi
- B : Kabid Pemasaran mengevaluasi kelayakan proposal
- C : Proposal diterima atau ditolak untuk proses selanjutnya
- D : Kabid Pemasaran mempersiapkan perjanjian pinjaman
- E : Kepala Kanwil/Cabang menugaskan Kabag Keuangan/Kabid Keuangan untuk mentransfer dana ke rekening mitra binaan

Gambar 3.1
Flowchart Prosedur Peminjaman Dana kepada Mitra Usaha

PT. Jamsostek (Persero) Kantor Cabang Cimahi sendiri telah melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) ini, sampai tahun 2010 perusahaan ini mempunyai 15 orang mitra binaan yang memiliki pinjaman untuk usaha di bidangnya masing-masing. Adapun rekapitulasi piutang pinjaman kemitraan PT. Jamsostek (Persero) Kantor Cabang Cimahi periode Januari-Desember 2010 :

Tabel Rekapitulasi Piutang Pinjaman Kemitraan PT. Jamsostek (Persero) Kantor Cabang Cimahi periode Januari-Desember 2010

No.	Mitra Usaha	Bunga Pinjaman	JUMLAH PINJAMAN		
			POKOK	BUNGA	TOTAL
	Lancar				
1.	Dang Ida	3%	10,000,000.00	900,000.00	10,900,000.00
2.	Kiki Rukanda	6%	10,000,000.00	1,800,000.00	11,800,000.00
3.	Sukarna	3%	10,000,000.00	900,000.00	10,900,000.00
4.	Enung R Herlina	6%	10,000,000.00	1,800,000.00	11,800,000.00
5.	Yety Tarwin	6%	10,000,000.00	1,800,000.00	11,800,000.00
6.	Riyanti Sari	6%	10,000,000.00	1,800,000.00	11,800,000.00
7.	Yayan Sabranjana	6%	10,000,000.00	1,800,000.00	11,800,000.00
8.	Ike Rahayu	6%	10,000,000.00	1,800,000.00	11,800,000.00
9.	Yaya Suhara	6%	20,000,000.00	3,600,000.00	23,600,000.00
10.	Juhana	6%	70,000,000.00	12,600,000.00	82,600,000.00
11.	Ani Dewi Kania	6%	10,000,000.00	1,800,000.00	11,800,000.00
12.	R Dedi Djuandi	6%	90,000,000.00	16,200,000.00	106,200,000.00
	Total		270,000,000.00	46,800,000.00	316,800,000.00
	Kurang Lancar				
1.	Mardjuriani L	6%	10,000,000.00	1,800,000.00	11,800,000.00
	Total		10,000,000.00	1,800,000.00	11,800,000.00
	Macet				
No	Mitra Usaha	Bunga Pinjaman	JUMLAH PINJAMAN		
			POKOK	BUNGA	TOTAL
1.	Metty Noviana A	3,17 %	10,000,000.00	951,000.00	10,951,000.00
2.	Boyke Danny F	3,17 %	10,000,000.00	951,000.00	10,951,000.00
	Total		20,000,000.00	1,902,000.00	21,902,000.00

Dari tabel rekapitulasi piutang pinjaman kemitraan PT. Jamsostek (Persero) Kantor Cabang Cimahi periode Januari-Desember 2010 diketahui 12 mitra binaan mengembalikan pinjaman dengan lancar, 1 mitra kurang lancar dan 2 mitra macet. Dan berikut adalah tabel dari hasil presentasinya :

Tabel 3.2 Presentase Tingkat Klasifikasi Pembayaran Angsuran Pinjaman Kemitraan Tahun 2010

No.	Klasifikasi	Jumlah	Presentase (%)
1.	Lancar	Rp. 316.800.000,00	90,38%
2.	Kurang Lancar	Rp. 11.800.000,00	3,37%
3.	Ragu-ragu	-	-

4.	Macet	Rp. 21.902.000,00	6,25%
	Total	Rp 350.502.000,00	100%

Dalam istilah Jamsostek ada beberapa kategori tunggakkannya diantaranya kategori lancar artinya lama tunggakkannya 1-2 bulan, lalu kurang lancar lama tunggakkannya selama 3-4 bulan dan kategori macet lama tunggakkannya lebih dari 4 bulan. Dengan presentase pinjaman yang termasuk lancar yaitu 90,38%, kurang lancar 3,37%, ragu-ragu tidak ada dan macet 6,25%. Dari data diatas dapat dikatakan bahwa; (1) Pembayaran yang lancar dalam pengembalian pinjaman dari mitra binaan cukup besar yaitu lebih dari 90%, namun akan lebih baik jika lebih dilihat lagi kekurangan apa yang menyebabkan mitra binaan melakukan pembayaran dengan kurang lancar atau macet, agar untuk selanjutnya tidak ada lagi pembayaran yang kurang lancar dan sebagainya; (2) Kurangnya sosialisasi bagi masyarakat, masih besarnya bunga yang diberikan dirasa menjadi dua hal yang menjadi faktor masih kurangnya jumlah pengusaha kecil yang mendaftar menjadi mitra binaan PT. Jamsostek (Persero) Kantor Cabang Cimahi; (3) Adanya perbedaan bunga pinjaman yang diberikan karena untuk pengembalian lima tahun dan dikenakan bunga 3% untuk pengembalian dengan jangka waktu tiga tahun, dan 6% untuk pengembalian dengan jangka waktu lima tahun, tergantung kemampuan mitra pengusaha kecil dalam melakukan pembayaran. Untuk membandingkan bunga pinjaman CSR khususnya PKBL PT. Jamsostek dengan beberapa perusahaan BUMN, berikut adalah tabel perbandingannya :

Tabel 3.3 Tabel Perbandingan Tingkat Bunga Pinjaman UKM Perusahaan-Perusahaan BUMN.

No.	Nama Perusahaan	Laba Penyisihan untuk CSR (per tahun)
1.	PT. Telkom Indonesia	6%
2.	Perusahaan Listrik Negara (PLN)	6-12%
3.	Bank Tabungan Negara (BTN)	6%
4.	PT. Pertamina	6%
5.	PT. Jamsostek (Persero)	3-6%

Pemberian pinjaman modal usaha ini membebankan biaya administrasi rata-rata 6% pertahun pada mitra binaannya, hal ini juga sesuai dengan pasal 12 (dua belas) ayat 2 (dua) Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER – 05 / MBU / 2007 yang berbunyi “Besarnya jasa administrasi pinjaman dana Program Kemitraan per tahun sebesar 6% dari limit pinjaman atau ditetapkan lain oleh Menteri”.

Namun berdasarkan hasil penelitian penulis ke lapangan dan data perbandingan dengan perusahaan BUMN lainnya, biaya administrasi yang dibebankan kepada mitra binaan tidak selalu 6%, akan tetapi juga ada yang dibawah 6% dan ada diatas 6%. Setelah penulis mengkonfirmasi ke pihak PT. Jamsostek (Persero) Kantor Cabang Cimahi yang diwakili Bapak Supriatna, didapatkan informasi mengenai perbedaan bunga pinjaman setiap perusahaan BUMN yaitu sebagai berikut “Hal ini tergantung kebijakan perusahaan atau mungkin disebabkan pada waktu ke lapangan akan dilihat terlebih dahulu oleh tim pemeriksa kondisi usaha Usaha Kecil Menengah (UKM) yang akan dibantu, setelah itu baru diputuskan oleh Kepala Bidang Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK) berapa biaya administrasi yang akan dibebankan pada UKM

tersebut. Seperti PT. Jamsostek itu kan perbedaannya dilihat dari perbedaan jangka waktu yang diminta mitra binaan, jadi tergantung perusahaannya.”

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa PT. Jamsostek (Persero) mengikuti standar dari BUMN yaitu bunga peminjaman untuk PKBL rata-rata 6%, agar pinjaman yang dikembalikan tidak bermasalah jika melebihi aturan yang ada dan PT. Jamsostek (Persero) mematok standar 3%-6% sesuai dengan masa pinjaman yang diminta oleh mitra binaan. Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari pinjaman kemitraan PT. Jamsostek (Persero), maka penulis meminta informasi dari salah satu mitra binaan PT. Jamsostek Cabang Cimahi, yaitu ibu Yeti Tarwin yang menyatakan bahwa “Usaha saya sangat terbantu dengan adanya pinjaman dari Jamsostek ini, saya meminjam dana untuk modal usaha sebesar 10 juta dengan bunga 6%, namun yang pasti saya dan mitra berharap lainnya sangat berharap dan akan lebih baik jika bunga yang diberikan diperkecil lagi.”

b. Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta (DPKP).

Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta atau lebih dikenal sebagai DPKP merupakan dana yang dihimpun dan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan peserta program Jamsostek yang diambil dari sebagian dana hasil keuntungan PT. Jamsostek (Persero). Pelaksanaan program DPKP ini berlandaskan pada Surat Menteri Keuangan No. S-521/MK.01/2000, tanggal 27 Oktober 2000 tentang Pedoman Umum Dana Peningkatan Kesejahteraan Pekerja (DPKP) yang disempurnakan melalui Keputusan Menteri Negara BUMN Kep-247/MBU/2008 tanggal 16 Desember 2008 tentang Pedoman Umum Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta. Dimana program DPKP ini merupakan tanggung jawab sosial perusahaan kepada peserta program Jamsostek dan atau keluarganya maupun masyarakat di sekitar lingkungan PT, Jamsostek (Persero) yang diprioritaskan bagi yang kurang mampu dan membantu badan/unit usaha yang mempunyai keterkaitan langsung dengan peningkatan kesejahteraan peserta program Jamsostek terutama bagi badan/unit usaha skala kecil. Kesejahteraan peserta menjadi tujuan utama diselenggarakannya program DPKP tersebut, sehingga diantara PT. Jamsostek dengan pesertanya maupun masyarakat di lingkungan sekitar harus terjalin hubungan dan kerjasama yang baik demi tercapainya kesejahteraan peserta yang diinginkan. Adapun beberapa program-program DPKP yang dilaksanakan oleh PT. Jamsostek (Persero), yaitu sebagai berikut :

o Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP)

Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP) adalah salah satu program dari Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta (DPKP) yang memberikan pinjaman sebagian Uang Muka Perumahan kepada tenaga kerja peserta Jamsostek untuk pemenuhan kebutuhan perumahan melalui fasilitas KPR dari perbankan. Tujuan dari PUMP ini adalah untuk membantu Tenaga Kerja peserta program Jamsostek dalam rangka pemilikan rumah melalui KPR perbankan. PUMP ini akan diberikan kepada tenaga kerja yang telah memenuhi persyaratan dengan jumlah maksimal yaitu sebesar Rp 20.000.000,- untuk penyaluran lewat perbankan dan Rp 15.000.000,- untuk penyaluran biasa. Tingkat suku bunga yang dikenakan oleh PUMP sangat ringan, yaitu sebesar 3% (tiga persen) pertahun,. Jangka waktu

PUMP maksimal 5 tahun dan tipe rumah yang mendapat dukungan PUMP-Jamsostek maksimal sampai dengan rumah sederhana (RS/T36).

o Bantuan Beasiswa

Bantuan beasiswa merupakan salah satu wujud program Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta (DPKP) dalam bidang pendidikan, sebagai sumbangsih PT Jamsostek (Persero) dalam rangka meningkatkan kecerdasan bangsa khususnya anak-anak tenaga kerja peserta Jamsostek. Program Bantuan Beasiswa bertujuan membantu tenaga kerja peserta Jamsostek dalam pembiayaan pendidikan anak tenaga kerja yang berprestasi untuk jangka waktu 12 bulan. Bantuan beasiswa yang diberikan oleh PT. Jamsostek (Persero) Kantor Cabang Cimahi adalah sebesar; (1) Tingkat SD -SLTP Rp 150.000,-/bulan selama 1 tahun; (2) Tingkat SLTA - Perguruan tinggi sebesar Rp 200.000,-/bulan selama 1 tahun

informasi dari salah satu peserta, yaitu orang tua dari penerima beasiswa 2011. Berikut hasil wawancara dengan penerima beasiswa tahun 2011 salah satunya ibu Maya mengatakan bahwa, "Saya berterima kasih kepada Jamsostek Cimahi yang telah memberikan bantuan beasiswa ini kepada anak kami, beasiswa ini sangat membantu kami dalam membiayai kebutuhan sekolah sehari-hari. Namun kami juga sangat berharap program beasiswa ini lebih ditingkatkan lagi, karena mengingat dana yang diberikan hanya sekali sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi seluruh biaya pendidikan sekarang ini dan belum tentu tahun berikutnya kami bisa memperoleh lagi." Dari pihak PT. Jamsostek (Persero) Kantor Cabang Cimahi memberikan tanggapan sebagai berikut "Bantuan beasiswa merupakan salah satu wujud program DPKP di bidang pendidikan atau sebagai sumbangsih PT Jamsostek (Persero) dalam rangka meningkatkan kecerdasan bangsa, khususnya untuk anak-anak peserta Jamsostek. Bantuan beasiswa bertujuan membantu peserta Jamsostek melalui pembiayaan pendidikan untuk anak-anaknya yang tergolong berprestasi untuk jangka waktu 12 bulan yang dibayar dimuka dan sudah peraturan dari pusat, pemberian beasiswa ini memiliki berbagai syarat selain untuk anak peserta yang berprestasi dan tidak mampu selain itu juga dilihat apakah perusahaan si peserta apakah taat dalam administrasi di Jamsostek ini atau tidak. Selain itu juga kami disarankan dalam pemberian kepada peserta tidak dua kali agar peserta yang lain tahun berikutnya bisa mendapatkan giliran."

o Pinjaman Koperasi Karyawan Pekerja

Pinjaman Koperasi Karyawan/Pekerja merupakan salah satu program dari Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta (DPKP) sebagai wujud kepedulian PT Jamsostek (Persero) dalam rangka mengembangkan perkoperasian di lingkungan pekerja. Program ini bermaksud untuk mendorong agar usaha karyawan dapat lebih bersaing dengan swasta, sehingga secara langsung dapat meningkatkan taraf hidup selaku peserta program Jamsostek.

Dari informasi dan data yang diberikan, ternyata hanya terdaftar satu Koperasi Karyawan (Kopkar) itupun merupakan Kopkar Jamsostek Cimahi. Dari penjelasan Bapak Supriatna didapatkan informasi sebagai berikut :

"Memang bantuan pinjaman koperasi karyawan ini memang hanya koperasi jamsostek Cimahi yang terdaftar, hal ini karena pertama di setiap perusahaan belum tentu memiliki koperasi lalu mungkin kurangnya minat koperasi

perusahaan-perusahaan untuk meminjam dana kepada PT. Jamsostek Cimahi ini dan dikarenakan masalah persyaratan pinjaman koperasi dimana pinjaman di atas Rp50 juta mengharuskan adanya agunan, sementara asset koperasi rata-rata milik perusahaan. Jadi mungkin banyaknya kesulitan untuk mengajukan pinjaman kepada pihak Jamsostek sehingga sangat minim sekali minat perusahaan untuk meminjam dana untuk koperasinya .”

Berikut adalah data rekapitulasi pinjaman koperasi karyawan PT. Jamsostek (Persero) Kantor Cabang Cimahi :

Tabel 3.4 Rekapitulasi pinjaman koperasi karyawan PT. Jamsostek (Persero) Kantor Cabang Cimahi sampai Desember 2010

NO	NAMA PERUSAHAAN	WAKTU PERJANJIAN		JUMLAH PINJAMAN		
		TGL	TGL JTP	POKOK	BUNGA	TOTAL
1	Kopkar Jamsostek Cimahi	28 Des 09	28 Des 14	50,000,000.00	7,500,000.00	57,500,000.00
TOTAL				50,000,000.00	7,500,000.00	57,500,000.00

REALISASI ANGSURAN			SISA PINJAMAN		
POKOK	BUNGA	TOTAL	POKOK	BUNGA	TOTAL
9,999,996.00	1,500,000.00	11,499,996.00	40,000,004.00	6,000,000.00	46,000,004.00
9,999,996.00	1,500,000.00	11,499,996.00	40,000,004.00	6,000,000.00	46,000,004.00

Berdasarkan hasil wawancara, data dan obeservasi lapangan yang dilakukan oleh penulis mengenai kegiatan CSR baik dari program DPKP maupun PKBL yang dilakukan oleh PT. Jamsostek (Persero) Kantor Cabang Cimahi namun ada beberapa program yang sebaiknya diperbaiki atau ditingkatkan, yaitu; (1) Untuk program PKBL khususnya peminjaman dana untuk pengusaha kecil agar bunga yang diberikan lebih kecil agar tidak membebani para mitra binaan dan memperkecil kemungkinan adanya para pengusaha yang membayar tidak lancar atau macet, kedua untuk bantuan pinjaman uang muka perumahan (PUMP); (2) Dari hasil yang ditemukan di lapangan adanya ketidaktelitian dalam memeriksa persyaratan peserta yang ingin mendaftar PUMP sehingga akan meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan seperti kasus tadi yaitu kemacetan pengembalian cicilan rumah karena peserta telah kabur dan tidak bertanggung jawab; (3) Untuk bantuan beasiswa disarankan untuk ikut mengawasi penyeleksian penerima beasiswa karena dengan jatah yang terbatas dan perusahaan yang pertama menyeleksi pemilihan penerima beasiswa, karena mungkin saja ada penerima lain yang lebih layak untuk dibantu lalu sebaiknya juga diawasi penggunaan dari beasiswa tersebut jangan sampai orang tua siswa menyalahgunakan bantuan tersebut untuk kebutuhan yang lain bukan untuk pendidikan; (4) Untuk pinjaman koperasi karyawan pekerja karena hanya terdaftar satu koperasi dan itupun koperasi karyawan Jamsostek Cimahi hal ini dikarenakan kurangnya minat koperasi perusahaan untuk meminjam dana

sosialisasi mengenai manfaat adanya koperasi di setiap perusahaan dan yang utama adalah dipermudahnya syarat peminjaman bagi perusahaan dalam peminjaman dana.

Bentuk lain dari prinsip *responsibility* melalui pelaksanaan CSR, perusahaan juga diharuskan membuat laporan pertanggungjawaban CSR berupa laporan keuangan. Tekanan dan tuntutan stakeholders kepada perusahaan yang mengharuskan melakukan tanggung jawabnya, direspon oleh perusahaan dengan menunjukkan berbagai bentuk aktifitas CSR ini menimbulkan biaya yang pada gilirannya akan disajikan antara lain dalam laporan keuangan/laporan tahunan perusahaan. Prinsip dasar GCG juga mengharuskan perusahaan untuk memberikan laporan bukan hanya kepada pemegang saham, calon investor, kreditur, dan pemerintah semata tetapi juga kepada stakeholders lainnya termasuk karyawan dan masyarakat.

PT. Jamsostek sendiri pada prakteknya selalu melaporkan kegiatan-kegiatan operasional, CSR, maupun aktivitas-aktivitas lain dalam bentuk pengungkapan di laporan keuangan, *website* perusahaan, media massa maupun laporan-laporan lain yang dirilis perusahaan. Namun saat ini karena perusahaan yang diteliti merupakan kantor cabang, laporan keuangan pun tidak dipublikasi kepada publik karena langsung dilaporkan kepada kantor wilayah yang selanjutnya diolah oleh kantor pusat Jamsostek, dan barulah oleh PT. Jamsostek (Persero) Kantor Pusat mempublikasikan melalui *website* nya. Dan setelah diteliti oleh penulis masih terdapat kekurangan dalam laporan keuangan CSR PT. Jamsostek (Persero) Kantor Cabang Cimahi, yaitu tidak adanya catatan atas laporan keuangan (CALK) yang dapat mempermudah pengguna dalam membaca laporan keuangan tersebut. Adapun penjelasan dari Kepala Bidang Keuangan PT. Jamsostek (Persero) Kantor Cabang Cimahi Bapak Nurhasan mengenai laporan keuangan program CSR “Untuk pelaporan keuangan dari program CSR, Jamsostek Cimahi membuat laporan keuangan khusus atau dipisahkan, yaitu laporan keuangan DPKP dan laporan keuangan PKBL dan isinya sendiri baik bentuk dsb tidak berbeda dengan laporan keuangan umum biasanya, mungkin kalau ada juga hanya nama pos-posnya saja yang sedikit berbeda, dan CSR dalam laporan keuangan dimasukkan dengan sebagai biaya PKBL dan biaya DPKP yang memang dipisahkan. Namun Jamsostek Cimahi tidak mempublikasikan laporan keuangan yang telah dibuat, kami langsung saja mengirim via email kepada Kantor wilayah IV PT. Jamsostek (Persero) Jabar&Banten, lalu diolah baru terakhir dikirim kepada Kantor Jamsostek Pusat yang nantinya akan diakumulasi secara nasional baru dipublikasikan di *website* Jamsostek, jadi tidak mempublikasikan per cabang.”

Berdasarkan pendapat diatas, dapat dilihat bahwa PT. Jamsostek (Persero) Kantor Cabang Cimahi adalah perusahaan yang berusaha bekerja berlandaskan pada prinsip-prinsip *good corporate governance*, dimana salah satu bentuknya dengan melaksanakan program CSR yang dijalankan dan membuat laporan keuangan DPKP dan PKBL secara rutin. Melengkapi pembahasan diatas mengenai peranan CSR dalam mengimplementasikan GCG PT. Jamsostek (Persero) Kantor Cabang Cimahi yang diwakili oleh Bapak Supriatna menyatakan pendapatnya sebagai berikut ”Komitmen PT. Jamsostek sendiri tentu

saja menerapkan GCG secara utuh dan kami selaku kantor cabang akan mengikuti komitmen tersebut. Dan memang tentu saja GCG tidak dapat terlepas dari CSR, namun CSR hanya menjadi salah satu bagian untuk mewujudkan GCG tersebut, karena CSR merupakan implementasi dari prinsip responsibility yang merupakan prinsip dari GCG.”

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa PT. Jamsostek (Persero) Kantor Cabang Cimahi juga berpendapat dengan melaksanakan aktivitas CSR dan pengungkapan sosial CSR merupakan bagian atau salah satu cara untuk mewujudkan GCG secara utuh.

Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di PT.Jamsostek (Persero) Kantor Cabang Cimahi mengenai “Peranan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam Mengimplementasikan *Good Corporate Governance* (GCG)”, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut; (1) Program CSR PT. Jamsostek Kantor Cabang Cimahi dalam bentuk PKBL dan DPKP telah dilaksanakan, namun belum optimal karena masih banyak kekurangan dari berbagai hal, seperti kurangnya sosialisasi dalam menginformasikan adanya program kemitraan kepada masyarakat khususnya pengusaha kecil di wilayah Cimahi dan sekitarnya, lalu program beasiswa juga perlu diawasi langsung oleh Jamsostek dalam pemilihan penerimanya agar lebih tepat sasaran untuk yang lebih membutuhkan, lalu untuk program PUMP masih adanya pembayaran yang kurang lancar dan macet yang disebabkan oleh tidak telitinya pihak Jamsostek dalam menganalisis persyaratan yang masuk sehingga terjadinya masalah dalam administrasi yang menghambat pembayaran angsuran PUMP dan untuk pinjaman koperasi juga dengan sangat minim nya peserta atau perusahaan yang mendaftarkan koperasinya untuk meminjam dana yang disebabkan sulitnya prosedur dan besarnya agunan menjadi penghambat utama bagi peserta; (2) PT. Jamsostek (Persero) Kantor Cabang Cimahi telah melaksanakan pelaporan CSR tersebut setiap bulan, yang dimana laporannya tersebut dibuat terpisah yaitu ada laporan keuangan PKBL dan laporan keuangan DPKP, namun terdapat kekurangan dalam laporan keuangan tersebut adalah tidak adanya catatan atas laporan keuangan yang merupakan salah satu bagian penting dari laporan keuangan, agar lebih mempermudah pengguna dalam membacanya.

Dengan masih banyak kekurangan dalam pelaksanaan CSR PT. Jamsostek (Persero) Kantor Cimahi ini diharapkan adanya perubahan dan perbaikan baik dari sistem, prosedur dan lain-lain agar pelaksanaan CSR ini dapat berjalan dengan baik karena jika CSR dijalankan dengan baik, berkesinambungan dan benar-benar memberikan manfaat bagi *stakeholder* dan tentu saja dapat mengimplementasikan prinsip *responsibility* dari GCG yang hasilnya nanti dapat menghasilkan profit, yang kemudian sebagian dari keuntungan tersebut akan dapat menjadi dana pelaksanaan kegiatan CSR. Jadi, karena belum optimalnya pelaksanaan CSR di PT. Jamsostek (Persero) Kantor Cabang Cimahi karena masih banyaknya kekurangan pada pelaksanaannya, maka dapat dikatakan Jamsostek Cimahi juga belum optimal dalam mengimplementasikan prinsip *responsibility* dari GCG.

Diharapkan dari hasil penelitian ini peneliti dapat menyumbangkan kontribusinya kepada pihak PT. Jamsostek (Persero) Kantor Cabang Cimahi, masyarakat pada umumnya dan pemerintah, berupa saran-saran sebagai berikut: (1) Kepada PT. Jamsostek (Persero) disarankan lebih mengoptimalkan kegiatan-kegiatan CSR yang ada dengan meningkatkan jumlah dana yang disalurkan untuk setiap cabang, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih banyak untuk para stakeholder, lalu diharapkan memberikan kemudahan-kemudahan dalam memberikan bantuan seperti, prosedur dan persyaratan yang lebih mudah, bunga pinjaman diperkecil dan lain-lain selain itu juga lebih meningkatkan pelaksanaan GCG yang ada dan mendorong kantor-kantor wilayah/cabang lainnya untuk selalu ikut serta dalam membangun GCG.(2) Kepada PT. Jamsostek (Persero) Kantor Cabang Cimahi dapat meningkatkan pelaksanaan program-program CSR yang telah ditentukan karena dengan pelaksanaan dan pelaporan CSR yang baik dapat membantu dalam mengimplementasikan GCG yang dapat dilihat melalui salah satu prinsipnya yaitu prinsip *responsibility*. Oleh karena itu untuk PT. Jamsostek (Persero) Kantor Cabang Cimahi diharapkan dapat memperbaiki pelaksanaan program-program CSR agar menjadi lebih baik, yaitu dengan meningkatkan sosialisasi CSR kepada masyarakat, menurunkan tingkat suku bunga pinjaman yang dibebankan agar tidak memberatkan mitra binaan atau masyarakat, lalu dalam sasaran untuk penerima bantuan lebih diperhatikan, agar penerima bantuan CSR adalah orang-orang yang memang berhak mendapatkannya, dan tidak agar tidak terjadi kemacetan pembayaran dan sebagainya pihak PT. Jamsostek (Persero) Kantor Cabang Cimahi diharapkan lebih teliti dalam mengawasi dan memeriksa data dan persyaratan bagi yang ingin mengajukan untuk menerima CSR. Lalu, untuk pelaporan pertanggungjawaban CSR dalam bentuk laporan keuangan akan lebih baik jika dipublikasikan kepada publik, baik melalui website, media massa dan lain-lain.(3) Kepada pemerintah, sangat diharapkan campur tangannya dalam mendorong pelaksanaan CSR dan GCG yang baik di seluruh perusahaan Indonesia seperti bantuan dan dan sebagainya, agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat, karyawan, perusahaan dan lain-lain bahkan dapat membantu pemerintah juga dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Burhan Bungin. (2010). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Diah Febriyanti.(2010).” *Good Corporate Governance sebagai Pilar Implementasi Corporate Social Responsibility*”.Skripsi.Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro
- Edi Suharto. (2009). *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri Memperkuat CSR*. Bandung: Alfabeta.
- Erni Tisnawati Sule & Kurniawan Saefullah. (2009). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Prenada Media Group.
- FCGI, 2001. *Corporate Governance: Tata Kelola Perusahaan*. Edisi Ketiga, Jakarta

- Gunawan Widjaja & Yeremia .A.P. (2008). *Resiko Hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*. Jakarta: Forum Sahabat.
- Hendrik Budi Untung.(2008), *Corporate Social Responsibility*.Jakarta: Sinar Grafika
- Husein Umar. (2003). *Metode Riset Akuntansi Terapan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Jenny Ratna Suminar. (2009). *CSR Adalah Bentuk Kesalahan Sosial Perusahaan (Institusi)*. Jurnal Komunikasi dan Informasi Vol. 8 No.1 Ed April.
- M.Nazir.(2005). *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Management*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Maman Ukas.(2006). *Manajemen Konsep, Prinsip dan Aplikasi*. Bandung : Agnini Bandung.
- Moleong, Lexy J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung:Rosdakarya.
- Muh. Arief Effendi.(2007).”*Implementasi GCG Melalui CSR*”. [Online]. Tersedia: <http://www.yipd.or.id/main/readnews/2948>. [06 Agustus 2011]
- Nor Hadi. (2011) .*Corporate Social Responsibility*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nursahid Fajar. (2005). *Praktik Kedermawanan Sosial BUMN*. Jurnal Galang Vol.1, No.2, Januari 2006. Depok: PIRAC.
- Rena Septy Amidita.(2010). “Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Kinerja Lingkungan Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI)”. Skripsi. Bandung: Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia
- Rimba Kusumadilaga.(2010).”Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Terhadap Nilai Perusahaan dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderating”. Skripsi. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Soetji Andari.(2009). *Peran Corporate Social Responsibility*. Media Info.Litkesos.Vol.33 No.4
- Soetomo. (2010). *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sofyan Syafri Harahap. (2007). *Teori Akuntansi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugesty Mulyanita.(2009).”Pengaruh Biaya Tangung jawab Sosial Perusahaan Terhadap Kinerja Perusahaan Perbankan”.Skripsi. Bandar Lampung.Fakultas Ekonomi Universitas Lampung.
- Thomas S. Kaihatu.(2003).” *Good Corporate Governance* dan Penerapannya di Indonesia”. [Online]. Tersedia. <http://puslit2.petra.ac.id/ejournal/index.php/man/article/viewFile/16505/16497> [05 Agustus 2011]
- Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007
- Wahyudin Zarkasyi.(2008).*Good Corporate Governance: Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya*. Bandung:Alfabeta
- Yudha Pranata.(2007). “Pengaruh Penerapan *Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan”. Skripsi. Yogyakarta. Fakultas Ekonomi
- Yusuf Wibisono. (2007). *Membedah Konsep dan Aplikasi Corporate Social Responsibility*. Gresik: Fascho Publishing